

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada
Pemerintahan Kabupaten Boyolali**

Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M

Tika Ayu Novita Dewy

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di suatu negara. Salah satu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah adalah dengan cara memperbaiki kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Kualitas pelayanan publik bisa ditingkatkan dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pemerintah maupun masyarakat, dan perbaikan fasilitas pelayanan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Subjek penelitian ini melibatkan narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali selaku pembentuk Peraturan Bupati terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kemudian, penelitian ini juga melibatkan responden yang berasal dari Pemerintah Kecamatan yang merupakan penyelenggara pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sudah memenuhi beberapa persyaratan dalam peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu pihak penyelenggara masih melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyempurnaan agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi seluruh kriteria dalam asas-asas pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pelayanan Terpadu, Standar Pelayanan, Pemerintahan Yang baik.

**Implementation Of The Regulations of Home Affairs Minister Number 4 In
2010 on Guidelines for Integrated Administration Service Program in Sub
District of Boyolali District Government**

Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M

Tika Ayu Novita Dewy

Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

For consummate the welfare for people in a country, one of the ways from the government is make the public service quality to be better . Public service quality can be upgraded with regulation renewal, increase the human resources quality, for goverments or people in a country. This research purpose to find out whether the sub-districts integrated administrative services is appropriate with the regulation and *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*.

Subject of this research involve the interviewees from Boyolali district goverment as regent regulation maker about implementation of guidelines for Integrated Administration Service Program in Sub District of Boyolali District Goverment. And then, this research also involve the respondents from sub district as the organizer, and all people who get service. Data analysis using descriptive and qualitative methods. The analysis showed that the implementation of sub-district integrated administrative services already appropriate with some points on regulation and some criteria on *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*. So, therefore the government still doing efforts for perfecting the implementation that can appropriate with all points on regulation and all criteria on *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*.

Keywords : District Government, integrated administrative services, service standart, good governace